

## **Partisipasi Perempuan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik Di Kabupaten Blitar**

**Andiwi Meifilina<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Balitar, Jawa Timur, Indonesia  
deap662@gmail.com  
andiwimeifilina1@yahoo.co.id

**Abstrak:** Dunia politik adalah dunia laki-laki akibat adanya *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan lain-lain. Kenaikan presentase calon legislatif ini menjadi perhatian besar, mengenai kemampuan berpolitik perempuan. Sebagian besar laki-laki menganggap perempuan sebagai pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis atau penggembira dalam dunia politik. Pada saat ini ada peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Blitar dari tahun 2004, 2009, 2014 sampai tahun 2019 maka dapat dilihat banyaknya perempuan yang terjun di dunia politik melalui lembaga legislatif. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam aktivitas komunikasi politik serta hambatan perempuan dalam politik. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datadilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini membahas tentang peran perempuan dalam politik kebangsaan dengan metode analisis historis, sebuah analisis yang berdasarkan pada sejarah yang telah terjadi. Adanya kemuculan gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian hadirnya pandangan tradisional yang bisa dibilang sangat relevan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak antas untuk dijadikan sebagai saingan. Pada saat ini untuk menempatkan posisi perempuan yang bisa menduduki kursi di parlemen pada pemerintahan seperti DPR, DPD, MPR, dan DPRD masih terbilang cukup kurang bahkan jika dilihat indeksinya menurun dari tahun ke tahun. Ke depan dalam keterlibatan perempuan dalam bidang politik masih harus terus dilakukan dukungan dari berbagai macam kalangan untuk memajukan dan meningkatkan peran perempuan agar kaum perempuan lebih percaya diri dalam mengakses di ranah politik dengan meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan politik bagi kaum perempuan.

**Kata kunci:** Partisipasi, Perempuan, Komunikasi, Politik

**Abstract:** *The world of politics is a man's world due to an image that may not be entirely accurate about political life, namely that politics is dirty, hard, full of intrigue and so on. The increase in the percentage of legislative candidates is a big concern regarding women's political abilities. Most men consider women as weak parties who are usually considered only sweeteners or cheerleaders in the world of politics. Currently, there is an increase in the number of female legislative members in the Blitar Regency DPRD from 2004, 2009, 2014 to 2019, so it can be seen that many women are entering the world of politics through legislative institutions. The aim of this study is to find out how women participate in political communication activities and the obstacles to women in politics. The method used in this study is a qualitative approach where research is used to examine natural objects where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out in combination, data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. This research discusses the role of women in national politics using a historical analysis method, an analysis based on history that has occurred. There are movements emerging that advocate equal position between men and women. Then the presence of traditional views which can be said to be very relevant places women in a position that is not worthy of being used as competitors. Currently, the position of women who can occupy seats in parliament in governments such as the DPR, DPD, MPR and DPRD is still quite lacking, even if you look at the index which is decreasing from year to year. In the future, women's involvement in the political field must continue to provide support from various groups to advance and increase the role of women so that women are more confident in accessing the political field by improving the quality of human resources with political education for women.*

**Keywords:** *Participation, Women, Communication, Politics*

## **Pendahuluan**

Munculnya anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting (Khotimah, 2009). Dunia politik adalah dunia laki-laki dan kesan ini muncul akibat adanya *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan lain-lain. Kenaikan presentase calon legislatif ini menjadi perhatian besar, mengenai kemampuan berpolitik perempuan. Sebagian besar laki-laki menganggap perempuan sebagai pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis atau penggembira dalam dunia politik. Sekarang ini juga banyak pula perempuan yang sudah menunjukkan eksistensi dan kinerjanya di dunia politik, sehingga menjadi sorotan masyarakat yang sedikit banyaknya mendongkrak popularitas dan citra partainya. Maka dari itu banyak partai politik mencari kandidat terbaik dari perempuan. Kuota 30% untuk perempuan masih menyisakan perdebatan tentang keadilan yang perlu diberikan, seperti *lipstick* yang menghiasi perhelatan pemilihan umum berbasis distrik proporsional. Asumsi dari wacana ini bahwa laki-laki dan perempuan yang menyuarakan kepentingan rakyat akan bersama-sama memperbaiki aspirasi seluruh penduduk Indonesia yang 56% perempuan (Naqiah, 2005).

Dalam pemerintahan reformatif, maka semakin terbuka iklim politik dan munculnya banyak partai politik yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat secara luas, dan menjadi peluang emas bagi perempuan. Partai politik sesungguhnya adalah wadah paling strategis untuk partisipasi politik perempuan dalam negara demokratis (Parawangsa, 2006). Namun, banyak juga partai politik yang menyalahgunakan hal tersebut dikarenakan kurangnya pengkaderan terhadap perempuan. Sehingga banyak partai politik yang asal-asalan merekrut perempuan hanya untuk memenuhi kuota tersebut. Banyak artis perempuan dijadikan subjek untuk menarik massa agar memilih partai tersebut. Beberapa diantaranya artis tersebut memang artis mempunyai kompetensi yang sudah biasa menjadi aktivis perempuan jadi sudah sering berkecimpung dalam menyuarakan aspirasi rakyat atau aktivitas yang membela hak-hak kaum perempuan. Disatu sisi ada juga artis perempuan yang kukemampuannya dalam berpolitik karena latar belakang pendidikan bukan dari politik dan tidak pernah melakukan kegiatan atau aktivitas di masyarakat, membuat banyak orang meragukan kemampuan artis perempuan tersebut untuk duduk di kursi parlemen.

Selain itu juga dari tokoh perempuan yang aktif di berbagai bidang dan organisasi karena dirasa lebih baik untuk pencitraan politik dan dianggap sangat potensial menjadi anggota legislatif. Perempuan yang memiliki wawasan politik akan sangat membantu partai politik dari segi kinerja

dan kegiatan-kegiatan politik lainnya karena memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan politik tersebut. Hal ini akan mempermudah untuk mendapat simpatik dan membentuk citra diri yang berimbang kepada citra partainya. Setiap partai politik akan melakukan kegiatan politik guna membangun kepercayaan masyarakat dalam konteks ini masyarakat sebagai pemilih yang akan memilih partai politik tersebut.

**Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 - 2014 menurut Asal Partai Politik**  
*Legislative Election Results 2004 - 2014 according to the Home Parties*

Nomor	Nama Partai	2004		2009		2014	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	PDI-Perjuangan	7	0	6	0	13	0
2	PKB	4	1	2	1	8	1
3	Partai Golkar	4	0	3	0	0	4
4	PPP	3	0	3	0	1	0
5	Partai Gerindra	-	-	-	-	5	1
6	Partai Demokrat	1	2	4	2	3	1
7	PKPB	1	0	0	0	-	-
8	Partai Hanura	0	0	2	0	0	0
9	PKS	1	0	0	1	2	1
10	PDS	1	0	0	0	-	-
11	PAN	-	-	-	-	6	1
12	Partai Nasdem	-	-	-	-	2	1
13	PKNU	0	0	1	0	-	-
<b>Jumlah / Total</b>		<b>22</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>10</b>

**Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blitar, 2022**  
*Number of Regional House of Representatives's Members by Political Parties and Sex in Blitar Regency 2022*

Partai Politik Political Parties	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDI Perjuangan	15	4	19
2. Partai Kebangkitan Bangsa	7	2	9
3. Partai Golkar	1	2	3
4. Partai Demokrat	1	1	2
5. PPP	1	-	1
6. Partai Amanat Nasional	6	1	7
7. Partai Keadilan Sejahtera	1	-	1
8. Partai Gerindra	4	2	6
9. Partai Nasdem	1	1	2
<b>Kabupaten Blitar</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>50</b>

Sumber: BPS Kota Blitar, 2024

**Gambar 1. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan tahun 2004-2009-2014 -2019**

Melihat peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Blitar dari tahun 2004, 2009, 2014 sampai tahun 2019 maka dapat dilihat banyaknya perempuan yang

terjun di dunia politik melalui lembaga legislatif, dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menulis penelitian "Partisipasi Perempuan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik Di Kabupaten Blitar"

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan digunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Sehingga dapat ditemukan data yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, perasaan, norma, keyakinan, sikap mental, etos kerja dan budaya yang dianut seorang maupun sekelompok orang dan lingkungannya kerjanya (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu yaitu anggota perempuan pada partai politik di Partai Golkar Kabupaten Blitar. Metode ini juga bertujuan untuk melukiskan secara menyeluruh dan sistematis fakta atau karakteristik individu atau kelompok tertentu secara mendalam dan cermat. Dalam hal ini fakta yang dilihat adalah kesesuaian antara hasil wawancara dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan informan-informan yaitu perempuan anggota Partai Golkar Kabupaten Blitar.

Paradigma adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir; basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi. Paradigma menurut Kuhn didefinisikan sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu (Komariah, 2010). Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan paradigma *post positivistic*. Paradigma ini berbicara bukan hanya terlibat, terasah dan teraba saja tetapi mencoba memahami makna dibalik yang ada. Realitas sosial menurut paradigma ini adalah suatu gejala yang utuh yang terikat dengan konteks, bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna. Oleh karena itu, mengetahui keberadaannya tidak dalam bentuk ukuran akan tetapi dalam bentuk eksplorasi untuk dapat mendeskripsikannya secara utuh (Komariah, 2010) karena dengan menggunakan paradigma *post positivistic* ini, peneliti berusaha untuk memahami tentang "Peran Perempuan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik di Partai Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Golkar Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar)". Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*, dengan memiliki pertimbangan atau penetapan kriteria-kriteria dalam menentukan informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisa data penelitian ini menggunakan analisis data model Milles and Huberman.

Dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti akan menggunakan tiga langkah pengolahan data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan metode, peneliti juga berusaha membandingkan data dari hasil wawancara, hasil pengamatan dan data dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Politik Perempuan Dalam Sejarah Indonesia**

Dalam sejarah politik Perempuan di Indonesia bahwa kehidupan masyarakat budaya patriarki merupakan permasalahan yang sangat pelik sejak beberapa abad yang lalu. Disadari atau tidak bahwa praktik tersebut telah mengkonstruksi manusia dengan perbedaan kelas "laki-laki dan perempuan" Dimana perbedaan tersebut terbagi menjadi pihak superior dan inferior. Pihak superior dapat mensubordinasi pihak inferior (Ritonga, 2016). Sejak abad ke-19, beberapa perempuan di Indonesia telah menjadi pelaku sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan, misalnya Nyi Ageng Serang XIX, Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, R.A. Kartini, dan lainlain. Akan tetapi, masa penting tersebut menjadi awal perjuangan yang mengatasnamakan gerakan perempuan pada tahun 1928, pada saat itu untuk pertama kalinya diadakan Kongres Perempuan di Yogyakarta (Hidayat, 1980).

Pergerakan terjadi karena ada semangat yang sama untuk menuju perbaikan ke arah yang lebih adil dengan struktur sosial yang dianggap timpang. Munculnya gerakan perempuan di berbagai negara-negara disebabkan oleh faktor-faktor kondisi sosial politik di negara tersebut. Lahirnya gerakan perempuan ini untuk memperbaiki tatanan pemerintahan dan kebudayaan masyarakat dalam menghadapi ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Sejarah perjuangan perempuan Indonesia berawal dari adanya kepedulian terhadap mutu keluarga. Munculnya pemikiran bahwa para ibu mempunyai peran penting dalam menyiapkan anak-anaknya menyongsong masa depan, yang kemudian menjadikan perempuan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Akan menjadi suatu hal yang mustahil apabila para ibu diberi tugas untuk mendidik anak-anaknya, sementara mereka sendiri tidak punya ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai pendidikan. Kesadaran terhadap perannya tersebut mendorong perempuan untuk mengejar pendidikan. Berawal dari permasalahan tersebut kemudian perjuangan emansipasi perempuan menjadi lebih berkembang ke relasi dalam pernikahan, peran dalam masyarakat dan termasuk dalam hak-hak berpolitik

### **B. Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia**

Sejak era reformasi, partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan kebijakan menjadi bagian yang penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi

yang inklusif masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat terwujudnya partisipasi politik dari kaum perempuan agar lebih luas. Persoalan akuntabilitas dan representasi merupakan persyaratan yang mutlak bagi terwujudnya demokrasi. Meskipun pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan dalam keikutsertaannya pada partisipasi politik telah bipraktekkan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa adanya peran keterwakilan perempuan didalam politik praktis, dan kebijakan-kebijakan yang ada memiliki sensitivitas gender. Meskipun perempuan telah terlibat dalam politik praktis, akan tetapi keterlibatan perempuan secara mandiri tidak dapat begitu saja terwujud meskipun hak-hak perempuan dalam dunia politik sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara utuh (Soetjipto, 2005).

Kehadiran perempuan di dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah kebijakan publik terutama untuk kepentingan perempuan. Jika keterwakilan Perempuan kurang maka cenderung menempatkan kepentingan laki-laki sebagai kepentingan paling utama sehingga dengan adanya keterwakilan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen, dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Secara umum, perempuan mempunyai hak untuk dapat aktif berpartisipasi di masyarakat termasuk dalam bidang politik yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap terciptanya suatu produk kebijakan (Warjiyati, 2016).

Keterlibatan perempuan di dunia politik memiliki peningkatan karena saat ini banyak para perempuan yang terjun langsung dalam politik praktis. Ada beberapa perempuan yang menjabat sebagai menteri pada kabinet Gotong Royong, selain itu pada saat ini banyak perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah. Keterlibatan perempuan pada saat ini banyak Perempuan yang mulai aktif bergabung di partai-partai politik yang ada. Akan tetapi, keterlibatan perempuan masih harus tetap ditingkatkan. Sehingga semakin banyak perempuan yang terjun secara langsung dalam politik, maka semakin besar kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap perempuan.

Adanya pendapat tersebut membuktikan bahwa politik tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia politik laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Kesetaraan gender dalam politik tersebut membuat perempuan menjadi *agent of*

*change* yang mempunyai potensi besar untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu peran perempuan harus diawali dengan pemberdayaan diri kemudian diberikan kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan posisi perempuan harus didukung pula dengan kesempatan, pendidikan, materi, kesempatan dan keterwakilan politik (Moser, 1993).

### **C. Hambatan Perempuan Dalam Dunia Politik**

Hambatan partisipasi politik perempuan juga terkadang menjadi problem. Untuk hambatan secara eksternal diantaranya (Kollo, 2017):

- a. Pemarginalan perempuan dari ranah publik
- b. Kompetensi
- c. Sistem perekrutan
- d. Aturan partai
- e. Hambatan birokrasi
- f. Hambatan ekonomi
- g. Hambatan pendidikan
- h. Hambatan agency.

Adapun hambatan internal diantaranya:

- a. Minat politik perempuan.
- b. Kemampuan politik perempuan
- c. Kesadaran politik Perempuan

Demi mencapainya suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik di parlemen atau lembaga politik untuk itu, perludanya dukungan langsung dari masyarakat dalam praktik politik sehingga para kaum perempuan bisa dengan percaya diri membuktikan dan mengimplementasikan langsung bahwa mereka pantas terjun dan berkecimpung langsung dengan dunia politik. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih pimpinan Negara atau secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi politik Negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen (Kollo, 2017).

Sedangkan menurut ketua Partai Golongan Karya Kabupaten Blitar dan sekaligus anggota legislatif di Kabupaten Blitar yaitu Ibu Dra. Suswati, M.M., M.H menyebutkan bahwa faktor yang menghambat keterwakilan Perempuan di legislatif khususnya di kabupaten Blitar adalah budaya. Berikut hasil wawancaranya:

*"Bahwa ada faktor yang melatar belakangi belum terpenuhnya kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yaitu budaya. Budaya masyarakat*

*Indonesia melihat politik adalah suatu yang kejam, buruk, licik, dunia yang keras sehingga menganggap perempuan tidak akan mampu bertahan lama dalam bidang politik. Masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa perempuan makhluk yang lemah sehingga jika berada di bidang politik akan kalah dengan kaum laki-laki. Karena faktor inilah yang menjadi alasan yang kuat keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif tidak memenuhi 30%."*

Betapa pentingnya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif adalah lembaga legislatif adalah salah satu dari tiga lembaga utama di ketatanegaraan Indonesia, salah satu tupoksi dari lembaga legislatif adalah legislasi (pembuatan undang-undang) dan penganggaran. Meskipun kuota keterwakilan perempuan telah disediakan sebanyak 30%, akan tetapi kuota tersebut belum memenuhi sepenuhnya dengan perubahan paradigma tentang budaya patriarki di masyarakat. Dengan demikian mengubah stigma masyarakat tidaklah mudah, masyarakat kita masih berfikir bahwa politik merupakan wilayah publik yang hanya diisi oleh laki-laki, dan Perempuan di ranah domestik

Di harapkan adanya keterwakilan kuota perempuan sebesar 30% dapat menghasilkan produk undang-undang yang ramah terhadap perempuan dan anak atau dapat membantu kaum perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya yang masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, dengan demikian ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus yang keputusannya memberatkan kaum perempuan atau adanya ketidakadilan terkait keputusan kasus yang menimpa kaum perempuan. Selain faktor budaya adanya faktor lain yaitu sebagian kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan dalam politik secara nasional menggunakan agama dan budaya sebagai alat untuk mendiskriminasi kaum perempuan. Ditambah lagi salah satu faktor terbesar dari akar permasalahan kurangnya kontribusi peran perempuan dalam bidang politik adalah budaya sehingga hal inilah yang seharusnya lebih mendorong peran perempuan lebih berkontribusi kepada bidang politik malah dipakai oleh sebagian kaum laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan dimana peran perempuan hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai pelengkap secara tertulis saja.

Dominasi laki-laki ini membuat institusi politik menjadi tampil maskulin. Struktur politik di Indonesia saat ini, masih didominasi oleh laki-laki dan sulit bagi perempuan untuk menembus barisan yang sudah sangat kuat, yaitu politisi laki-laki. Selain bersaing dengan laki-laki di ranah politik, perempuan juga diharapkan dapat memainkan peran yang tergolong peran perempuan. Sangat ironis jika perempuan terjun ke dunia politik kerap mendapat opini negatif karena anggapan bahwa perempuan telah mengambil sifat dan peran laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya selama ini perempuan masih mengalami kesulitan karena banyaknya tekanan dalam masyarakat itu sendiri. Sikap diskriminatif sering terjadi dalam partai politik, serta rendahnya kuota perempuan dalam partai politik menjadikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut terjun secara

langsung semakin kecil. Adanya persentase kuota perempuan dalam partai politik diharapkan dapat

meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam parlemen dan memperkuat perempuan dalam menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan. Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik:

- a. Pendidikan politik sejak dini dari keluarga terutama untuk Perempuan
- b. Mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi
- c. Sosialisasi kaum perempuan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik

Untuk itu perempuan di dalam politik harus mampu mendekonstruksi citra baru untuk membangun sosok perempuan dalam politik. Hal ini akan terwujud bila memiliki dukungan dari lembaga dan masyarakat. Sehingga antara perempuan dan laki-laki bisa berjalan berdampingan di bidang politik tanpa adanya diskriminasi.

## **Kesimpulan**

Adanya pengaruh budaya yang terbentuk di masyarakat yang secara umum masih mengikuti budaya patriarki. Yang akhirnya budaya tersebut mempengaruhi beberapa fungsi dan kedudukan perempuan termasuk sikap politik dan kehidupan sosial kaum perempuan di negara Indonesia. Kebijakan untuk memberi ruang lebih kepada perempuan sekitar 30% pada legislatif bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi bagi perempuan diharapkan keterwakilan perempuan bisa menghasilkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang bisa mengakomodir perempuan maupun anak yang dalam tataran masyarakat Indonesia masih terjadi diskriminasi. Faktor kurangnya peran perempuan dalam konteks politik bukan karena budaya, akan tetapi sebagian kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan dalam politik secara nasional memakai budaya untuk mendiskriminasi kaum perempuan. Ditambah lagi salah satu faktor terbesar dari akar permasalahan kurang kontribusinya peran perempuan dalam bidang politik adalah budaya sehingga faktor inilah yang seharusnya lebih mendorong peran perempuan lebih berkontribusi kepada bidang politik malah dipakai oleh sebagian kaum laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga peran perempuan memang hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai pelengkap secara tertulis saja.

## **Referensi**

- Hidayat, M. (1980). *Beberapa Aspek Perjuangan Kaum Perempuan*. Jakarta: Binacipta.
- Khotimah, S. (2009). *Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan*. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding*, 318-320.

- Komariah, D. S. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Moser. (1993). *Gender Planning and Development; Theory, Practice and*. London : Roudlledge.
- Naqiah, N. (2005). *Otonomi Perempuan*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Parawangsa, K. I. (2006). *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Jender*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ritonga, D. S. (2016). Kajian Gender Pada Novel Karya Nawal El Saadawidan Sutan Takdir. *Arabiyât : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 3, (1), 17.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah Hukum dan*, 1-27.